

## Pendidikan Politik Masyarakat Pesisir Menghadapi Pemilu 2024

Suasa<sup>1</sup>, Sulfitri Husain<sup>2</sup>, Meldi Amijaya<sup>3</sup>, M. Yogi Pratama Maruf<sup>4</sup>,  
Faradila Oktafiani<sup>5</sup>

<sup>1,3</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Tadulako

<sup>2,4,5</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Tadulako

[sulfitrih@gmail.com](mailto:sulfitrih@gmail.com)<sup>2</sup>

---

### Abstrak

**Kata Kunci:**  
Pemilu,  
Pendidikan  
Politik,  
Partisipasi,  
Masyarakat  
Pesisir

Pemilihan umum 2024, masyarakat akan melakukan pemilihan Legislatif, pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah. Sama seperti pemilu sebelumnya, pemilu mendatang diselenggarakan serentak. Pemilu yang akan berlangsung hendaknya didukung oleh partisipasi masyarakat. Namun, hingga saat ini masih banyak warga Indonesia yang enggan untuk berpartisipasi dalam proses pemilu. Minimnya keterlibatan masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah kurangnya pendidikan politik kepada masyarakat. Menyikapi hal tersebut, melalui pengabdian ini perlu memberikan pendidikan politik khususnya kepada masyarakat pesisir yang terletak di kelurahan Kayumalue Kota Palu. Ini menjadi sarana kepada masyarakat agar pemahaman dan pengetahuan terkait politik dapat meningkat, sehingga masyarakat dapat terlibat dalam proses pemilihan umum yang demokratis dalam menentukan sikap dan pilihan. Tanggung jawab dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat melibatkan berbagai pihak yang bukan hanya pemerintah, ataupun penyelenggara pemilu, melainkan akademisi juga memiliki tanggung jawab penuh agar masyarakat dapat mensukseskan jalannya kepemiluan termasuk menghadapi pemilu 2024. Metode pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi secara langsung kepada masyarakat setempat.

### A. Pendahuluan

Memberikan hak suara dalam pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat sebagai wujud sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Demokrasi yang dimaknai sebagai sistem pemerintahan dimana masyarakat memiliki kedaulatan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (Radhitya, K., 2019). Maka dari itu, dalam menyambut pemilihan umum 2024, diharapkan keterlibatan masyarakat untuk mengambil peran dalam menentukan sikap, mengawal, serta mengawasi agar pemilihan umum dapat berjalan dengan aman, bebas, jujur, dan adil. Pemilihan umum merupakan proses aktif yang melibatkan setiap warga negara dalam waktu tertentu agar

dapat menentukan siapa yang berhak dalam menjalankan pemerintahan (Pahlevi & , Azka Abdi Amrurrobi, 2020). Dalam hal ini dibutuhkan Pendidikan politik agar masyarakat dapat memahami dan menyadari pentingnya keterlibatan dalam sistem politik yang cerdas dan kritis.

Pendidikan politik adalah kegiatan yang ditujukan pada individu dengan tujuan pembentukan nilai moral yang berorientasi politik yang dilaksanakan secara bertanggung (Kantaprawira, R., 2006). Sedangkan Gabriel Almond menjelaskan pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik dalam membentuk dan menunjukkan bagaimana seharusnya masyarakat ikut berpartisipasi. Hal ini dijelaskan juga oleh Wayan Sohib yang melihat pendidikan politik tidak terbatas pada partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, akan tetapi membangun tanggung jawab dalam menyelesaikan berbagai persoalan dalam suatu negara (Rahman, 2018).

Pada umumnya, masyarakat telah paham hak serta kewajibannya sebagai warga negara. Akan tetapi ditengah masyarakat yang plural, masih ditemukan warga yang mengabaikan hal tersebut. Adapun masyarakat pesisir adalah kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan daratan dan lautan yang mata pencahariannya mencari ikan atau melaut (Mahfudlah Fajrie, 2016). Tidak hanya masyarakat pesisir yang jarang tersentuh oleh informasi politik, masyarakat umum lainnyapun serupa, sehingga mereka terkadang acuh tak acuh terhadap kegiatan politik. Faktor lainnya adalah: rendahnya tingkat pendidikan, ketidakpercayaan kepada pemerintah sebelumnya dan yang akan datang, munculnya sikap jenuh yang dianggap tidak membawa perubahan positif bagi kehidupan rakyat, prioritas memenuhi kebutuhan hidup (bekerja) dibanding mengikuti sosialisasi. Ini kemudian menjadikan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemilu naik turun karena dirasa tidak berpengaruh dalam kehidupan mereka.

Perubahan jumlah partisipasi politik dapat dilihat dari pemilihan Gubernur dan Wakilnya yang dilakukan secara serentak pada tahun 2020. Pemilihan yang telah berlangsung tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Sulawesi Tengah. Pada tahun 2020 tingkat partisipasi pemilih hanya 74,23% yang artinya tidak mencapai target nasional yang telah ditetapkan oleh KPU RI dengan jumlah 77,5%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan belum tercapai secara merata. Di beberapa daerah menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dengan pelampauan jumlah yang telah ditetapkan secara nasional, sebaliknya masih ada daerah yang belum mencapai target dengan jumlah partisipasi di bawah target. Hingga saat ini, hal terkait partisipasi pemilihan dipahami oleh sebagian masyarakat sebagai upaya yang dilakukan untuk mobilitasi masyarakat dalam mencapai kepentingan sekelompok orang.

Partisipasi tidak diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam mengontrol kebijakan pemerintah. Atas dasar ini, pemberian pendidikan dalam partisipasi politik kepada masyarakat sangatlah diperlukan. Kayumalue Ngapa merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah dengan total jumlah penduduk 4.195 orang <https://kayumaluengapa.palukota.go.id/>. Dari tingkat pendidikan umumnya warga Kayumalue Ngapa hanya lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas) (“Kurangi Pengangguran Di Kayumalue Ngapa,” 2019), dan sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Dari gambaran yang ada sehingga sangat perlu pendidikan politik agar masyarakat lebih memahami betapa pentingnya partisipasi untuk dapat memecahkan masalah dan mengantisipasi perubahan serta kemajuan yang akan terjadi di masa mendatang. Pendidikan politik harus dapat memajukan dan mengembangkan pengetahuan rakyat sehingga partisipasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat meningkat. Oleh karena itu, tim pengabdian melakukan sosialisasi dengan tema “Pemilu dan Peran serta masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik”. Adapun tujuan sosialisasi ini untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya keterlibatan ataupun partisipasi dalam mensukseskan pemilihan umum sehingga mendapatkan pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab.

## B. Metode Pengabdian

Pengabdian kegiatan masyarakat ini memfokuskan kepada masyarakat pesisir yang ada di Kelurahan Kayumalue Ngapa, Palu, Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2023. Sebelum menyampaikan sosialisasi pengabdian, tim terlebih dahulu melakukan perizinan kegiatan kepada pihak kelurahan agar dapat difasilitasi dengan warga setempat. Selanjutnya tim pengabdian memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait pendidikan politik, agar partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 2024 yang akan datang dapat meningkat dari pemilu yang sebelumnya. Adapun alat dan bahan yang di gunakan terdiri dari: infokus untuk menampilkan materi dalam bentuk *slide power point*, spanduk terkait tema kegiatan, dan kamera untuk mendokumentasikan kegiatan tersebut. Secara detail pelaksanaan kegiatan dapat di lihat pada tabel dan penjelasan berikut,

**Tabel 1.**

## Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan kegiatan	Implementasi Kegiatan
1	Observasi lokasi
2	Menentukan sasaran/target kegiatan
3	Menemukan permasalahan
4	Diskusi tim pengabdian kepada masyarakat dengan mitra pengabdian dalam hal ini pihak kelurahan Kayumalue Ngapa
5	Menyiapkan persuratan termasuk surat tugas dan ijin melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
6	Memastikan kesiapan alat dan bahan yang digunakan (spanduk, infokus, kamera)
7	Sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat Kayumalue (penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan sharing)
8	Membuat laporan pengabdian

Tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam beberapa fase, antara lain:

1. Perencanaan

Dalam tahapan ini dibentuk tim pengabdian pada masyarakat dan ditindaklanjuti dengan mengadakan pembekalan kepada tim pelaksana kegiatan pengabdian yang terdiri dari 3 (tiga) dosen dan 2 (dua) orang mahasiswa. Pelaksanaan program akan berlangsung selama satu tahun yang terhitung sejak bulan Januari hingga Desember 2023.

2. Persiapan

Tahap selanjutnya adalah persiapan dengan melakukan identifikasi persoalan terkait pendidikan politik masyarakat pesisir di Kelurahan Kayumalue Kota Palu Menghadapi Pemilu 2024. Persiapan selanjutnya adalah membuat persuratan dan mempersiapkan alat pendukung lainnya berupa materi, alat tulis, alat rekam, dan spanduk.

3. Pelaksanaan kegiatan

Model pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan secara langsung (tatap muka) dengan memberikan sosialisasi/ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian kegiatan selanjutnya dilaksanakan *sharing* untuk mengukur ketercapaian kegiatan pengabdian pada masyarakat yang telah dilakukan.

4. Hasil Pengabdian Dan Pembahasan

Pemilu serentak 2020 pemilihan pasangan Gubernur Sulawesi Tengah dan Wakilnya belum mencapai target nasional yang ditetapkan KPU RI sebanyak 77,5%. Saat itu, partisipasi pemilih hanya mencapai 74,23%. Tercatat partisipasi pemilih sebanyak 2.055.320 pemilih terdaftar, dan yang menggunakan hak pilih hanya sebesar 1.521.571, artinya hak suara sebanyak 533.749 tidak digunakan atau suara tidak terpakai. Sementara,

jumlah presentase yang rendah partisipan dan tidak mencapai target tingkat nasional terdapat di 6 daerah antara lain: Kabupaten Buol (68,98%), Kabupaten Donggala (70,15%), Kabupaten Banggai Kepulauan (74,58%), Kota Palu (63,06%), Kabupaten Morowali (51,95%), dan Kabupaten Parigi Moutong (72,97%). Data sebaran partisipasi dan presentase pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 per Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut (Raden dkk., 2019).

**Tabel 2.**

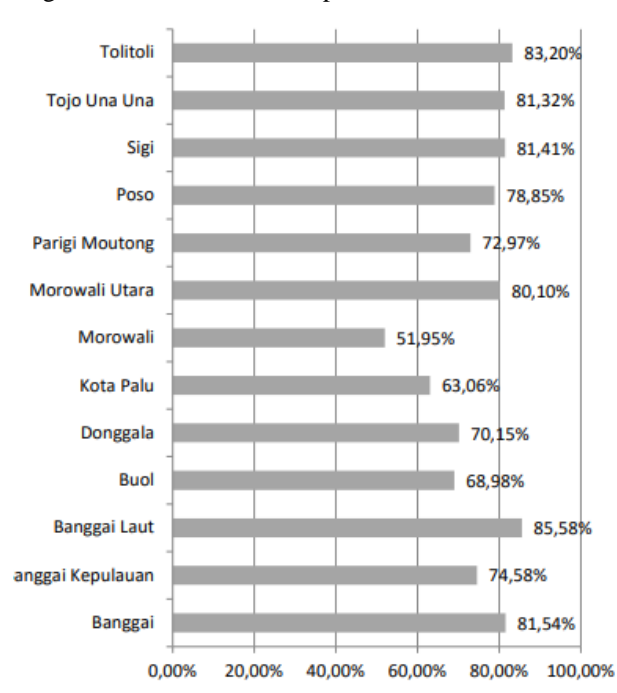
Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilihan Tahun 2020 Per-Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah

No	Kabupaten/ Kota	Pemilihan Gubernur			
		DPT	DPTb	Jumlah Pemilih (DPT+DPTb)	Parti- sipasi
1	Banggai	246.784	5.162	251.946	205.425
2	Banggai Kepulauan	84.570	173	84.743	63.202
3	Banggai Laut	47.645	778	48.423	41.442
4	Buol	100.770	414	101.184	69.795
5	Donggala	205.662	883	206.545	144.891
6	Kota Palu	250.635	9.279	259.914	163.907
7	Morowali	111.942	482	112.424	58.408
8	Morowali Utara	84.570	1.662	86.232	69.075
9	Parigi Moutong	294.069	1.974	296.043	216.023
10	Poso	158.646	2.624	161.270	127.168
11	Sigi	171.926	3.552	175.478	142.853
12	Tojo Una Una	114.963	2.029	116.992	95.143
13	Tolitoli	150.009	4.117	154.126	128.239
	<b>SULAWESI TENGAH</b>	2.022.191	33.129	2.055.320	1.525.571

Sumber: KPU Prov. Sulawesi Tengah

**Tabel 3.**

Presentase Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 Per Kabupaten/Kota



Sumber: KPU Prov. Sulawesi Tengah

Dari data yang ada tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan belum tercapai secara merata. Di beberapa daerah menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dengan pelampauan jumlah yang telah ditetapkan secara nasional, sebaliknya masih ada daerah yang belum mencapai target dengan jumlah partisipasi di bawah target.

Pengabdian ini menitikberatkan pada pendidikan politik masyarakat pesisir kelurahan Kayumaalua kota Palu dalam menghadapi pemilu 2024 yang akan memilih Presiden dan wakilnya, pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPD akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Sedangkan pemilihan kepala daerah Serentak diadakan pada 27 November 2024 mendatang. Di tengah demokratisasi dan kebebasan politik masih ditemukan sikap apatis di kalangan pemilih. Fenomena apatisisme politik atau dikenal dengan golongan putih (Golput) cukup meresahkan keberlangsungan demokrasi. Menyadari hal ini sangat perlu adanya pendidikan politik yang menekankan pencegahan dan mencari solusi atas menurunnya partisipasi warga dalam memilih. Oleh karena itu, Meningkatnya jumlah masyarakat yang tidak terlibat dapat dikaitkan

dengan banyak faktor. Salah satunya adalah kualitas pendidikan politik yang masih rendah dan tidak tersampaikan kepada masyarakat.

Dalam proses pemberian materi diberikan ruang kepada masyarakat untuk bertanya sehingga terjadi diskusi dan *sharing*. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bentuk-bentuk partisipasi dan bentuk pelanggaran yang sering terjadi di tengah masyarakat dalam menghadapi pemilihan. Tidak lupa dalam materi tersebut mengimbau kepada masyarakat agar tidak takut untuk melaporkan hal-hal yang dianggap pelanggaran yang dapat merusak kesuksesan pemilu.

Wilayah pesisir Kayumalue sendiri dalam mewujudkan tingkat partisipasi masyarakat masih menemukan kendala antara lain: 1). masyarakat saat ini cenderung acuh, cuek, masa bodoh terhadap proses politik atau perkembangan politik di negara ini, 2). masih kurangnya peran pemerintah dalam pendidikan politik kepada masyarakat, yang kemudian menyebabkan terjadinya golput. Faktor tersebut menjadi permasalahan yang cukup serius dan harus segera ditangani. Berikut tabel permasalahan dan solusi agar melalui pendidikan politik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat setempat yang ada di Kelurahan kayumalue.

**Tabel 4.**  
Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
Masih Rendahnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Pendidikan Politik	Memberikan Pemahaman Terkait Pendidikan Politik Kepada Masyarakat Pesisir. Menumbuhkan Kesadaran Dalam Sikap Yang Postif Baik Terhadap Diri Sendiri Dan Lingkungan Sekitar Untuk Sadar Dan Mau Belajar Terkait Pendidikan Politik.
Masih Rendahnya Partisipasi Masyarakat Pesisir Terhadap Politik	Menambah Wawasan Dan Pemahaman Kepada Masyarakat Pesisir Untuk Dapat Terlibat Dalam Proses Politik Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sebagai Warga Negara. Mengarahkan Masyarakat Pesisir Untuk Terlibat Secara Aktif Tidak Hanya Sebagai Peserta, Tetapi Juga Ikut Mengawasi Prose Yang Ada. Mengarahkan Masyarakat Dalam Menentukan Sikap Baik Secara Langsung Ataupun Tidak Langsung Untuk Memilih Pemimpin Yang Amanah Melalui Pemberian Suara. Melakukan Komunikasi Dan Keterbukaan.

Permasalahan	Solusi
	Berani Bersikap Dan Bertanggung Jawab Terhadap Bentuk Pelanggaran.

**Gambar 1.**

Foto Bersama Tim Pengabdian, Ibu Lurah Kayumalue Ngapa, Dan Masyarakat Pesisir



Sumber: tim pengabdian, 2023

### C. PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menjadi dasar masyarakat pesisir untuk lebih mengetahui proses politik dalam menghadapi pemilu 2024 yang akan datang. Dalam hal ini, masyarakat akan lebih berpartisipasi agar dapat menghasilkan pemimpin yang lebih bertanggung jawab dan peduli kepada masyarakat. Melalui pendidikan politik ini, masyarakat juga lebih memahami tindakan yang akan menghambat proses pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil). Meskipun demikian, pendidikan politik tidak sampai disin saja. Perlu dilakukan secara berkesinambungan agar pemahaman dan pengetahuan masyarakat pesisir menjadi lebih baik lagi khususnya dalam meningkatkan partisipasi dalam pemilihan umum.

### D. Daftar Pustaka

- Kantaprawira, R. (2006). *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*. Sinar Baru Algensindo.
- Kurangi Pengangguran Di Kayumalue Ngapa. (2019). *Sulteng Raya*.
- Mahfudlah Fajrie. (2016). *Budaya Masyarakat Pesisir Wedung Jawa Tengah: Melihat Gaya Komunikasi dan Tradisi pesisiran*. Mangku Bumi.



- Pahlevi, M. E. T., & , Azka Abdi Amrullohi. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa Moch Edward Trias Pahlevi, Azka Abdi Amrullohi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Universitas Gadjah Mada. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(1). <https://doi.org/10.32697/integritas>.
- Raden, S., Intam Kurnia, & Randi Atma R. Massi. (2019). *Partisipasi politik dan perilaku pemilih (dinamika partisipasi pemilih pada pemilihan serentak 2020 di Sulawesi Tengah)*. KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
- Radhitya, K. (2019). Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Untuk Meningkatkan Partisipasi Terhadap Pemilihan Umum Dalam Membangun Demokrasi. *Prosiding Nasional Hukum Dan Kewarganegaraan, 2019*.
- Rahman, A. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan Diterima Pebruari 2018; Disetujui April 2018; Dipublikasikan Juni 2018. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1). <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis>